



Pengaruh Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Penerapan Kebijakan Reklamasi (Studi Kasus : Kawasan Reklamasi Kampoeng Air Jangkang)

Dwi Mardyanti^{1✉}, Tri Mulyani Sunarharum²

Pascasarjana Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Gadjah Mada

Dosen Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Gadjah Mada

Email: dwimardyanti99@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Berlakunya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan umum sebagai wujud dari kebijakan otonomi daerah menimbulkan eksplorasi kegiatan pertambangan besar-besaran dimana masyarakat berlomba-lomba menjadi penambang yang tanpa disadari eksplorasi tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan seperti meningkatnya lahan kritis dan menimbulkan kolong – kolong besar. Sehingga guna mengurangi dampak tersebut maka perusahaan wajib menyerahkan rencana reklamasi selama 5 tahun sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan reklamasi tersebut telah berhasil atau tidak, dimana hal itu bisa ditinjau berdasarkan dampak yang ditimbulkan setelah diberlakukannya reklamasi dengan berdasarkan persepsi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan berdasarkan studi literatur, kuisioner dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan spss sebagai alat bantu analisis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan reklamasi tersebut hanya memberikan dampak pada aspek sosial ekonomi sebesar 16,5%. Dampak terhadap aspek sosial berkenaan dengan persepsi masyarakat mengenai lahan ex tambang. Sedangkan untuk dampak aspek ekonomi belum bisa dirasakan oleh masyarakat mengingat kawasan tersebut belum terbuka untuk umum dan masih sedikit masyarakat dilibatkan. Sehingga dengan demikian kebijakan reklamasi kampoeng air jangkang dinilai belum efektif karena manajemen kelola dalam kawasan masih kurang baik mengingat masih banyak area dalam kawasan yang belum dimanfaatkan secara optimal mengingat kebijakan reklamasi tersebut telah diterapkan sejak 2013. Dalam hal ini, perlu adanya perbaikan dalam manajemen kelola di kawasan reklamasi kampoeng air jangkang, serta masyarakat harus lebih banyak dilibatkan lagi. Sedangkan untuk pemerintah daerah bersama aparat desa bisa berperan dalam melakukan kontrol dan pengawasan terkait kawasan reklamasi tersebut.

Kata kunci : *Reklamasi, sosial ekonomi, persepsi masyarakat*

Abstract

The enactment of Regional Regulation No. 6 of 2011 concerning general mining management as a form of regional autonomy policy has led to massive exploration of mining activities where people are competing to become miners who unwittingly have an impact on the environment such as increasing critical land and causing large pits. In order to reduce these impacts, companies are required to submit a reclamation plan every 5 years in accordance with applicable regulations. This research is intended to determine whether the reclamation policy has been successful or not, where it can be reviewed based on the impact caused after the implementation of reclamation based on community perceptions. This research is a quantitative descriptive research based on literature studies, questionnaires and documentation. This research uses regression analysis with spss as an analysis tool. Based on the results of the study, it was found that the reclamation policy only had an impact on the socio-economic aspect of 16.5%. The impact on social aspects is related to the community's perception of ex-mining land. Meanwhile, the impact on economic aspects cannot be felt by the community considering that the area is not yet open to the public and there are still few people involved. Thus, the reclamation policy of kampoeng air jangkang is considered ineffective because the management in the area is still not good considering that there are still many areas in the area that have not been optimally utilised considering that the reclamation policy has been implemented since 2013. In this case, there needs to be improvements in management in the kampoeng air jangkang reclamation area, and the community must be more involved. Meanwhile, the local government and village officials can play a role in controlling and supervising the reclamation area.

Keywords: *Reclamation, socio-economic, community perception*

PENDAHULUAN

Pulau Bangka merupakan salah satu daerah yang hingga kini masih aktif dalam kegiatan pertambangan timah dan merupakan salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia. Saat ini area pertambangan timah sudah dikuasai bukan hanya PT. Timah Tbk, tetapi pertambangan lainnya dilakukan oleh smelter swasta dan penambang dari masyarakat yang disebut tambang inkonvensional (Wijayani, 2020).

Tambang inkonvensional merupakan salah satu tambang yang bisa dikategorikan pertambangan rakyat dengan ciri ilegal, namun cukup signifikan dalam kontribusi produksi timah di Bangka. Berdasarkan data terakhir Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juli 2020, sumber daya timah di pulau Bangka mencapai 10,05 miliar ton dengan cadangan 6,81 miliar ton (CnbcIndonesia, 2021).

Operasi penambangan bukan hanya dilakukan di darat melainkan juga terdapat operasi penambangan timah di laut. Sehingga dikhawatirkan akan mengancam ekosistem laut mengingat Pulau Bangka selain berpotensi dari segi pertambangan juga berpotensi dari segi pariwisata. Pada dasarnya, kegiatan penambangan ini mampu menghasilkan

keuntungan financial dari nilai ekonomi bijih timah dan membantu ekonomi masyarakat namun bisa juga memberikan dampak negative terhadap lingkungannya.

Terkait dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 4 tentang MINERBA, yang memberikan kebebasan ruang gerak kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan daerah terkait kegiatan pengelolaan pertambangan bijih timah, sehingga dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah no 6 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan umum, mengakibatkan jumlah "kolong" eks tambang semakin meningkat. Explorasi kegiatan pertambangan secara besar-besaran ini mengakibatkan banyaknya penyulundupan timah dan rusaknya lahan yang berbentuk lobang besar yang disebut "kolong"(Sari & Buchori, 2015).

Dampak negatif dari penambangan timah adalah adanya lubang-lubang yang disebut kolong, kolong ini ditinggalkan begitu saja oleh para penambang timah karena dianggap tidak produktif lagi. Saat musim hujan, lubang ini akan menampung air, sehingga saat curah hujan meningkat, air yang tidak tertampung akan meluap ke pemukiman warga dan infrastruktur seperti jalan raya akan lebih rentan rusak. Selain itu, penambangan timah skala kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem mulai dari pesisir hingga hutan, bahkan sebagian hutan lindung dan hutan konservasi menjadi sasaran penambangan timah, baik legal maupun ilegal. Kegiatan penambangan timah rakyat juga menyebabkan kelangkaan kayu dan air sungai menjadi keruh karena digunakan untuk mencuci bijih timah. Kegiatan penambangan timah ini juga menyebabkan pendangkalan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat pembuangan sisa lumpur galian tambang ke sungai dan menjadi salah satu penyebab banjir (HS, 2016).

Mengacu dari adanya perubahan dan masalah tersebut, kegiatan reklamasi menjadi salah satu hal yang dibutuhkan, karena Reklamasi merupakan kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan negara yang menginginkan kelestarian sumberdaya alam (Baskoro, 2021). Selain bertujuan untuk mencegah erosi dan untuk menjaga kestabilan lahan agar tetap produktif, reklamasi ini juga diharapkan mampu menambah value lingkungan.

Reklamasi merupakan salah satu bentuk tanggungjawab oleh PT Timah Tbk sebagai salah satu perusahaan yang aktif dalam kegiatan penambangan timah di pulau Bangka. Hal ini juga sesuai dengan Undang Undang No 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Setiap izin usaha penambangan harus menyerahkan

rencana reklamasi lahan per lima tahun satu kali. Saat ini reklamasi pasca tambang timah baik di Bangka maupun Belitung masih terus digalakan oleh pemerintah dan PT timah Tbk. Salah satu kegiatan reklamasi yang dilakukan di Pulau Bangka adalah Kampoeng Reklamasi Air Jangkang di Kecamatan Merawang.

Kampoeng reklamasi Desa Air Jangkang Kecamatan Merawang merupakan salah satu proyek kegiatan reklamasi tahun 2013, yang mana dalam kegiatan tersebut memanfaatkan eks tambang timah menjadi lokasi wisata keluarga dan agrowisata dengan konsep 4E; education, ecology, environment, dan economy. Beberapa areal sudah menjadi kawasan hijau dengan konsep agrowisata. Berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan kebijakan reklamasi yang dilakukan di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dinilai tidak efektif karena masih terdapat kegiatan TI (tambang inkonvensional) yang ditemukan di lahan reklamasi PT Timah Tbk dan adanya kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat setempat (Sari & Buchori, 2015). Namun saat ini, kebijakan terkait reklamasi pasca tambang masih terus digalakan oleh PT. Timah Tbk selaku perusahaan yang bertanggungjawab dalam kegiatan pertambangan.

Kampoeng Reklamasi Desa Air Jangkang Kecamatan Merawang saat ini dinilai potensial jika dijadikan sebagai obyek pariwisata di pulau Bangka. Bahkan PT. Timah sendiri sebagai pemilik lahan berupaya agar kawasan kampoeng reklamasi air jangkang bukan hanya sebagai obyek wisata saja tetapi mampu memberikan manfaat bagi sosial ekonomi masyarakat. Adanya reklamasi tentu memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, misalnya dengan adanya reklamasi ini menimbulkan sengketa antara masyarakat bermata pencaharian sebagai penambang dengan PT. Timah Tbk berkenaan dengan kepemilikan lahan maupun pelaku kegiatan tambang mengingat pada penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa masih ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang menjadi kendala dalam proses pra reklamasi sebelumnya.

Pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai kampoeng reklamasi didasarkan pada indikator dari tahapan pra reklamasi lahan bekas tambang, tahap pelaksanaan program terhadap pembangunan Kampoeng Reklamasi dan keberhasilan serta dampak sosial ekonomi masyarakat terhadap keberadaan Kampoeng Reklamasi menyatakan berdampak positif terhadap masyarakat sekitar area reklamasi hal ini berdasarkan diniali dari persepsi masyarakat sekitar (Tambang, 2021).

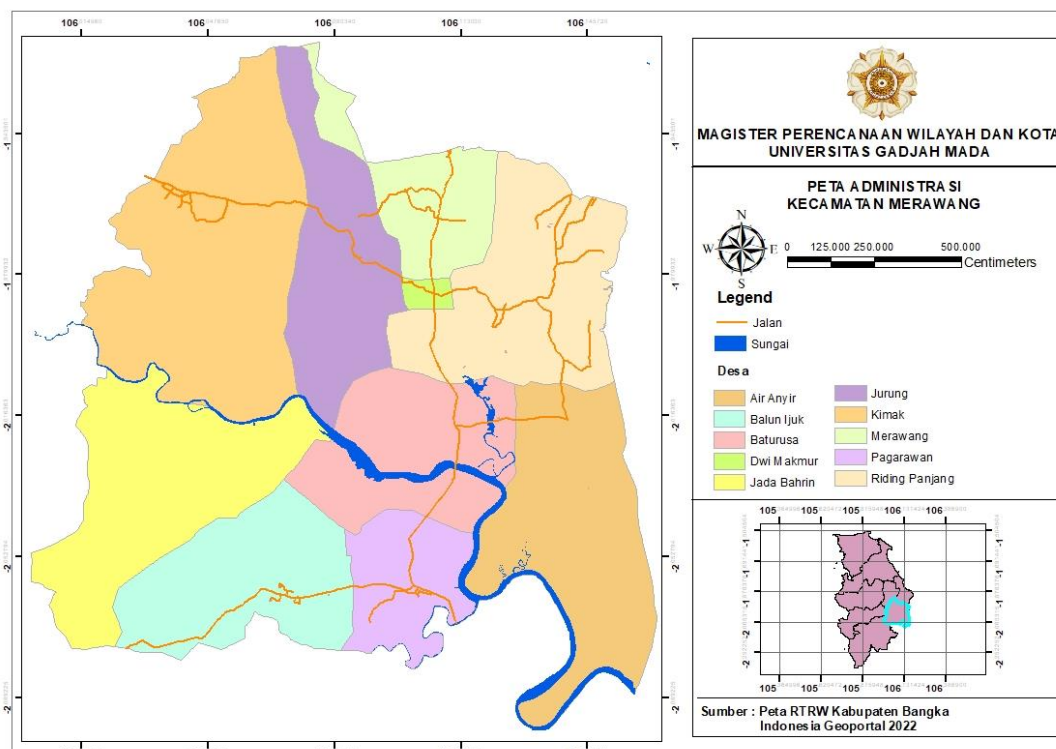
Dampak positif dari adanya penerapan kebijakan reklamasi ini adalah PT. Timah Tbk melibatkan masyarakat riding panjang, serta stakeholder dari beberapa komunitas penggiat lingkungan seperti Animal Lovers Bangka Island (ALOB) dan Yayasan O2 pelawan dalam proses pengelolaan dan pengembangan obyek wisata di kawasan tersebut. Dampak sosial

dimasyarakatnya setelah kawasan kampoeng air jangkang dikembangkan sebagai obyek wisata adalah menimbulkan rasa solidaritas di masyarakat desa riding panjang karena Kampoeng Reklamasi ini tidak hanya diminati masyarakat sekitar atau masyarakat lokal tetapi masyarakat luas dengan disediakan tempat berkumpul bersantai sambil menambah wawasan di Wisata Kampoeng Reklamasi yang menjadi sarana masyarakat untuk saling berinteraksi. Dampak ekonominya adalah memberikan peluang bagi masyarakat dalam hal mata pencaharian ataupun penyediaan lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan pendapatan atau penghasilan masyarakat. bahkan masyarakat diberikan kebebasan untuk memanfaatkan lahan reklamasi sebagai lahan pertanian (Baskoro, 2021).

Merujuk dari adanya dampak yang ditimbulkan baik itu dampak positif maupun dampak negatif, penulis tertarik untuk meneliti mengenai hubungan antara kebijakan reklamasi tersebut terhadap dampak bagi masyarakat terutama dampak sosial ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan berdasarkan kuisioner, studi literatur dan dokumentasi. Penentuan variabel dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang direduksi sehingga memperoleh empat variabel didalam penelitian ini yaitu : penataan ruang, kelembagaan, sosial, ekonomi.



Gambar 1 Peta Kecamatan Merawang

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan

masyarakat Kecamatan Merawang maupun masyarakat yang sudah pernah mengunjungi kawasan reklamasi kampoeng air jangkang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan bantuan spss, dengan tujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara aspek sosial ekonomi terhadap penerapan kebijakan reklamasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan reklamasi air jangkang merupakan salah satu langkah dan inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup sebagai wujud dari dampak aktivitas penambangan. Melalui aktivitas penataan kawasan reklamasi kampoeng air jangkang sebagai kawasan pasca tambang, mampu memberikan dampak yang baik dan diharapkan mampu diperluas ke *ex* tambang timah lainnya. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Reponden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki – laki	52	52%
2.	Perempuan	48	48%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan, 2023

b. Responden berdasarkan usia

Tabel 2 Responden Berdasarkan Usia

No.	Rentang Usia (Tahun)	Jumlah
1.	20 – 25	47
2.	26 – 30	40
3.	31 – 35	11
4.	36 – 40	2
Jumlah		100

Sumber : Data Olahan, 2023

c. Responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 3 Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pelajar/Mahasiswa	39
2.	PNS	12
3.	Karyawan Swasta	11
4.	Wiraswasta	21
5.	Nelayan	3
6.	Penambang	9
7.	Petani/Kebun	5
Jumlah		100

Sumber : Data Olahan, 2023

Hasil dari penelitian menunjukkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi dari uji F dalam hal ini $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan kebijakan reklamasi mempengaruhi aspek sosial ekonomi masyarakat. Namun ternyata setelah diuji t menunjukkan bahwa hasil nilai t hitung untuk variabel sosial sebesar 4.071 sedangkan nilai t tabel untuk $\alpha = 0.05$ (5%) dengan derajat kebebasan 100 ($n - 2 = 100 - 2 = 98$) sebesar 1.984, berarti $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($4.071 > 1.984$) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kontribusi antara penerapan kebijakan reklamasi dengan aspek sosial masyarakat. sedangkan untuk variabel ekonomi sebesar $0.017 < 1.984$ berarti tidak ada pengaruh kontribusi antara penerapan kebijakan reklamasi dengan aspek ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian selanjutnya digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi aspek sosial ekonomi terhadap penerapan kebijakan reklamasi. Hasil analisis menunjukan bahwa nilai R^2 (koefisien determinasi) atau R square sebesar 0.165 atau 16.5%. dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penerapan kebijakan reklamasi mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat hanya sebesar 16.5% dan selebihnya 83.5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini setelah dilakukan uji regresi dengan bantuan spss diperoleh persamaan, $Y = 34.172 + 0.589X_1 + 0.027X_2 + \varepsilon_i$. Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa koefisien arah regresi (b) bertanda positif sebesar 0,589 dan 0,027, serta koefisien konstanta (a) sebesar 34.172. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai $\beta_0 = 34.172$ yang menunjukkan bahwa apabila nilai penerapan kebijakan reklamasi konstan maka dampak sosial dan ekonomi sama dengan 34.172. sedangkan jika nilai dari variabel sosial

(x1) adalah 0.589 berarti menunjukkan jika aspek sosial meningkat satu – satuan, maka penerapan kebijakan reklamasi (Y) akan naik sebesar 0.589. sedangkan untuk aspek ekonomi sebesar 0.027 yang artinya jika aspek ekonomi meningkat satu-satuan maka penerapan kebijakan reklamasi akan naik sebesar 0.027.

Hasil dari uji regresi dalam penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan reklamasi di Kawasan Kampoeng Air Jangkang Desa Riding Panjang hanya mempengaruhi pada aspek sosial masyarakat sedangkan untuk aspek ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung pada aspek sosial yang bernilai lebih besar daripada t tabelnya, masing-masing $4,071 > 1,984$ sedangkan untuk nilai t hitung pada aspek ekonomi memiliki nilai lebih kecil daripada t tabelnya. Studi kasus mengenai kebijakan reklamasi kampoeng air jangkang pada kenyataannya hanya memberikan pengaruh terhadap aspek sosial masyarakat sedangkan aspek ekonomi dinilai masih belum memberikan dampak apapun. Pengaruh yang diberikan dari kebijakan reklamasi kampoeng air jangkang dari segi sosial masyarakat berkenaan dengan pola pikir dan pengetahuan masyarakat.

Selain dari pola pikir masyarakat, kawasan ini bisa dikatakan belum memberikan pengaruh ekonomi bagi pertumbuhan wilayah Kabupaten Bangka bisa dipicu berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka itu sendiri. Berdasarkan data PDRB dari tahun 2019 – 2021 menunjukkan bahwa tiga sektor utama perekonomian Kabupaten Bangka yaitu (1) industri pengolahan, (2) pertanian, kehutanan dan perikanan, serta (3) pertambangan dan penggalian. Ketiga sektor utama ini nantinya akan dikembangkan menjadi core business di Kabupaten Bangka. Ketiga sektor utama perekonomian itu secara tidak langsung bersinggungan dengan aktivitas pertambangan yang ada di Kabupaten Bangka, untuk industri pengolahan itu lebih kepada pengolahan non migas sedangkan pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu next step yang akan dilakukan bila mana potensi bijih timah di Bangka mulai menurun baik itu dari kuantitas, kualitas maupun harga jualnya.

Namun kembali lagi kenapa kebijakan reklamasi kampoeng air jangkang ini tidak dirasakan oleh masyarakat terkait perubahannya dari segi ekonomi karena masyarakat sudah memiliki alternatif pekerjaan yang dirasa menjanjikan contohnya mencoba beralih profesi ke bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan industri pengolahan. Itulah mengapa dari hasil analisis regresi menghasilkan simpulan bahwa keberadaan reklamasi kampoeng air jangkang ini tidak memberikan perubahan yang sangat signifikan pada aspek sosial ekonomi di masyarakat.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reklamasi kampoeng air jangkang ini hanya memberikan perubahan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat sebesar 16,5%. Dampak terhadap aspek sosial berkenaan dengan persepsi masyarakat mengenai lahan ex tambang. Sedangkan untuk dampak aspek ekonomi belum bisa dirasakan oleh masyarakat karena kawasan tersebut masih belum terbuka untuk umum dan masih dalam tahap pembenahan. Sehingga dengan demikian, kebijakan reklamasi tersebut bisa dikatakan tidak efektif karena belum memberikan dampak sosial dan ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kawasan mengingat masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan reklamasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, I. (2020). Upaya Konservasi Mineral Dan Proyeksi Masa Depan Pertambangan Timah Di Indonesia. *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*, 1(1), 863–874.
- Asparita, V. (2021). Persepsi Masyarakat dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Lahan Bekas Tambang Sebagai Kampoeng Reklamasi Air Jangkang di Desa Riding Panjang Kabupaten Bangka. *Jurnal Agribisnis Vol 14. No 1*, 1613-1623.
- Baskoro, R. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kampoeng Reklamasi PT. Timah Dalam Menunjang Pengembangan Sektor Pariwisata di Desa Riding Panjang Kabupaten Bangka. *Jurnal Studi Inovasi Vol. 1 No.2*, 70-76.
- Dalam, P., Tanah, P., Ditinjau, T., Implementasi, D., Pertambangan, P. P., Pertanahan, A. D. A. N., Tinggi, S., Nasional, P., & Nasional, B. P. (2018). *Laporan Hasil Penelitian*.
- Erman, E. (2010). Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka. *Jurnal Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 36(2), 71–101.
- Faisal. (2021). Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Kasus Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba). *Jurnal Belo Vol. 7 No. 2*, 199-212.
- Fajriani, S. B. (2015). Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Kekerasan Pelecehan Seksual di Aceh. *Majelis Pendidikan Daerah Aceh*, 50-65.
- Ferdiana. (2020). Komunikasi Pariwisata Pertambangan Kabupaten Bangka. *JURNAL INOVASI*, 42-50.
- Fitri Wahyuni. (2017). Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung. *Jurnal Administratio Fisip Unila*, 89–103.
- H, R. D. (n.d.). Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

- Hambali, R., & Wahyuni, S. (2021). The potential for land erosion due to primary tin mining in Bangka Island. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 926(1).
- Harahap, F. R. (2016). Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah Di Pulau Bangka. *Jurnal Society*, Volume VI Nomor I, 61-69.
- Haryadi, D. (2018). Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung. *Jurnal Hukum Progresif : Volume XII/No.2*, 2083-2101.
- HS, Y. (2016). Analisis Dampak Pertambangan Timah Rakyat Terhadap Bencana Banjir. *Prodi Manajemen Bencana*, 3(1), 57–73.
- Huda, M. C. (2013). Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup. *Perspektif*, 18(2), 126.
- Indra, C. A. (2014). Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional Di Pulau Bangka. *Society*, 2(1), 26–41.
- Japar, J. M. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai Di Kota Makassar. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 7(2), 205. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i2.17912>
- Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Kurniawan, Ali. R; Surono, W. (2013). Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan : Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 9(September), 165–174.
- Linanda, A., & Mukti, H. (2017). "Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kota Samarinda." *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 66.
- Mahdi, I. (2017). Reklamasi Teluk Jakarta : Sebuah Perspektif Kekuasaan dalam Ekonomi Politik. *JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL VOL 4 NO 1*, 38-45.
- Mayasoni, L. (2022). Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 2(3), 169–173.
- Mongabay Situs Berita Lingkungan. (n.d.). Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/sistem-perencanaan-tata-ruang-di-indonesia/>
- Nifsiah, D., & Yogyakarta, U. M. (2019). *Upaya Reklamasi Pasca Tambang Timah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun. January 2017*.
- Nomor, V. V, & Kolondam, H. F. (2020). Pengaruh Reklamasi Pantai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan (Studi Kasus Kelompok Nelayan Di Kawasan Megamas). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(85), 19–30.

- Oktorina, S. (2018). Kebijakan Reklamasi Dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia). *Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan*, 4(1), 16–20.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengusahaan Tambang Mineral Batubara. *Pemerintah Republik Indonesia*, 036360, article 112.
- Pirwanda, F., & Pirngadie, B. H. (2015). Dampak Kegiatan Tambang Timah Inkonvensional Terhadap Perubahan Guna Lahan di Kabupaten Belitung. *Jurnal Planologi Unpas*, 2(3), 177–194.
- Pratama, S. (2018). DIMENSI EKONOMI POLITIK DALAM KONFLIK TATA KELOLA PERTAMBANGAN (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016). *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 40–53.
- PT.SUCOFINDO. (2023, January 12). Bagaimana Tahapan Reklamasi Yang Ramah Lingkungan. *Remediasi*.
- Puspasari, R., & Turni, S. (2017). Di Teluk Jakarta Impact Analysis of Land Reclamation To Environment and Fisheries in Jakarta Bay. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 9(November), 85–94.
- Rizki, A. N., & Firmansyah, A. (2021). Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6(1), 37–54. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v6i1.1117>
- Sari, D. P. (2015). Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, Biro penerbit Planologi Undip*, 299–312.
- Sawitri, D. (2006). PROFESI PERENCANA DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF. *Mimbar Volume XXII No. 1*, 15 - 32.
- Sintong, M. (2011). Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang untuk Tempat Rekreasi dengan Reklamasi Di Sungai Bingai Kecamatan Binjai Selatan Kodya Binjai. *Jurnal Geografi*, 3(2), 11–18.
- Sipil, D. T., Muhammadiyah, U., & Utara, M. (2019). 342-Article Text-722-1-10-20200123. 12(September), 83–91.
- Sudirman, A. (2018). *Pengaruh Reklamsi Pantai terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Lasusua (Studi Kasus: Kecamatan Lasusua)*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Suryaningtyas, D. T. (2020). *Reklamasi Lahan-lahan Bekas Tambang: Beberapa*

permasalahan terkait sifat-sifat tanah dan solusinya Reklamasi Lahan-lahan Bekas Tambang: Beberapa Permasalahan Terkait Sifat-Sifat Tanah dan Solusinya Efthotd: January.

- susilo rahardjo, g. (2013). pemahaman individu teknik nontes. jakarta: kencana.
- Syauqi, A., Sudrajat, J., Anbiyak, N., Hutahaeen, B., & Adnis, R. (2020). Kampoeng Reklamasi: A case study of the designation reclamation type of an ex-tin minein Bangka Island, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 413(1), 3–8.
- Syahputra, I. (2018). Strategi Media Relations Perusahaan Pertambangan Timah dan Agenda Setting Media di Bangka Belitung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 91.
- Tambang, L. (2021). *ISSN No 2086-7956 E-ISSN No 2615-5494 PERSEPSI MASYARAKAT DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI TERHADAP LAHAN BEKAS TAMBANG TIMAH SEBAGAI KAMPOENG REKLAMASI AIR JANGKANG DI DESA RIDING PANJANG KABUPATEN BANGKA COMMUNITY PERCEPTION AND SOCIAL-ECONOMIC IMPACTS ON THE . 14(2086)*
- Wagiu, M. (2011). Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis*, 7(1), 12.
- Wijayani, I. (2020). *BANGKA. 14(1)*, 42–50.
- Wijaya, T. (2021). Integration, Synergy and Harmony of Mining Activity with Tourism Sector : Utilization of Tin Tailing and Mine Reclamation Program in The Special Economic Zones. *Mine Closure, Qualified Mining Consultans LLC*.
- Yogie Wirdaningsi Adi, A. N. I., Widodo, S., & Nurwaskito, A. (2017). Analisis Reklamasi Tambang Batukapur Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Geomine*, 5(2), 68–75.
- Yulianti. (2020). Analisa Pertambangan Timah Di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi, Volume 22 Nomor 1*, 54-62.
- Zulkifli Aspan. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup). *Amanna Gappa*, 25(2), 9–24.